KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

ISSN 1693-0231

INDONESIA

MENTERI PERTAHANAN RI SEBAGAI LEADING SECTOR DALAM PENGEMBANGAN FOOD ESTATE BEKERJASAMA DENGAN MENTERI PUPR DAN MENTAN

EDISI JULI-AGUSTUS 2020 NOMOR 2

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Salam Redaksi

Para pembaca WIRA yang budiman,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin-Nya-lah Majalah Wira Kemhan kembali menyapa para pembaca WIRA melalui Edisi bulan Juli-Agutus 2020 Nomor 2. Pada edisi ini redaksi akan menyajikan beberapa informasi dan artikel yang layak untuk disimak oleh pembaca WIRA.

Informasi yang kami berikan terkait dengan kegiatan pimpinan Kementerian Pertahanan yang terangkum dalam rubrik Fokus Pimpinan mulai dari Menhan, Wamenhan, Sekjen Kemhan dan Irjen Kemhan.

Adapun artikel yang redaksi sajikan mengenai tugas yang diberikan Presiden RI kepada Menhan RI dalam penanganan ketahanan pangan nasional serta reaksi cepat Menhan RI dalam penanganan pandemi Covid-19.

Dengan kerendahan hati, semoga informasi dan artikel yang kami sajikan dalam Majalah WIRA edisi Juli-Agustus 2002 kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca setia WIRA dimanapun berada dan bertugas.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Selamat membaca...!!!

Kepala Biro Humas,

Brigjen TNI Ignatius Eko Djoko P., S.A.P., S.E., M.M.

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat : Menteri Pertahanan/Letjend TNI (Purn) Prabowo Subianto - Sekjen Kemhan/Marsdya TNI Donny Ermawan T., M.D.S. - Pemimpin Umum : Karo Humas Setjen Kemhan/Brigjen TNI Ignatius Eko Djoko P., S.A.P., S.E., M.M. Pemimpin Redaksi : Kabag Infopubliktaka Biro Humas/Kol Laut (P) Hadi Prayitno - Redaksi : M. Adi Wibowo, M.Si./Kapten Cku Lindu Baliyanto - Desain Grafis : Imam Rosyadi/Mandiri Triadi, S.Sos. - Foto : Fotografer Biro Humas - Percetakan & Distribusi: Nadia Maretti, M.M. - Diterbitkan oleh: Biro Humas Setjen Kemhan - Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta -Telp. 021-3829151, Fax. 3452457

Edisi Juli-Agustus 2020

Nomor 2

Daftar Isi

Fokus Pimpinan>>

5 **Giat Menhan**

Menhan didampingi Wamenhan Temui Menteri LHK Bahas Kelanjutan Program *Food Estate*

Kemhan dan TNI Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Kunjungan Kerja Menhan RI ke Sesko TNI Bandung

Presiden RI Didampingi Menhan Kunjungi Kesiapan Lokasi *"Food Estate"* di Kalteng Untuk Perkuat Ketahanan Pangan

9 **Giat Wamenhan**

Kemhan dorong Indhan kembangkan Faskes untuk lawan Covid-19

Wamenhan Bersama Wamen LHK Tinjau Lahan *"Food Estate"* di Kalteng

Wamenhan: Kekuatan Ketahanan Pangan Tak Kalah Penting dengan Kekuatan Senjata

13 **Giat Sekjen**

Sekjen Kemhan RDP dengan Komisi I DPR RI Bahas Ketahanan Nasional Atasi Virus Corona

Sekjen Kemhan : Pada Implementasi Tatanan Normal Baru, Kesehatan & Keselamatan Pegawai yang Paling Utama

15 **Giat Itjen**

Irjen Kemhan Menghadiri Penandatanganan Maklumat Pelayananan Itjen Kemhan Tahun 2020

Artikel

16 Peran Industri Pertahanan melalui Transformasi Produk Alpalhankam menjadi Produk Strategis Guna Penanganan Covid-19

21 Peningkatan Kerjasama Melalui Forum Regional dan Internasional Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

28 Peran Industri Pertahanan Melalui Transformasi Produk Alpalhankam Menjadi Produk Strategis Guna Mendukung Penanganan Covid-19

35 Menhan Sebagai *Leading Sector* Dalam Pengembangan Food Estate Bekerjasama Dengan Men PUPR dan Mentan

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Menhan didampingi Wamenhan Temui Menteri LHK Bahas Kelanjutan Program *Food Estate*

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, Senin (3/8) didampingi Wakil Menhan RI Sakti Wahyu Trenggono, melaksanakan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta.

Pertemuan ini adalah kelanjutan dari instruksi Presiden RI Joko Widodo mengenai rencana pengembangan kawasan "Food Estate" di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN.

Menhan RI Prabowo Subianto secara resmi ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan "Food Estate" dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara. Kementerian LHK mendapat tugas untuk mengawal aspek lingkungan hidup dan kehutanan diintegrasikan dengan pemulihan gambut.

Turut hadir dalam pertemuan ini mendampingi Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan Sekjen Kem LHK Bambang Hendroyono.***

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kemhan dan TNI Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Kementerian Pertahanan dan TNI menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2019 dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2019 tersebut diserahkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFra., CSFA., kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kamis (30/7) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta.

Menhan RI Prabowo Subianto menekankan kepada jajaran Kemhan dan TNI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 secara tuntas dan disertai bukti dukungan yang solid dan valid meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan dituntaskannya hasil rekomendasi BPK RI ini akan semakin memperkuat komitmen Kemhan dan TNI dalam penerapan good governance dan clean governance.

Laporan keuangan Kemhan dan TNI terdiri 5 komponen yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari hasil pemeriksaan BPK, Kemhan dan TNI kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan wujud nyata dari komitmen dan kerja keras bersama untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilaksanakan BPK RI hasilnya adalah opini yang merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran laporan keuangan yang diserahkan/ dilaporkan. BPK dalam melakukan audit memberikan 4 level opini, dengan menggunakan 4 standar acuan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal.

Keberhasilan Kemhan dan TNI meraih opini WTP dari BPK RI untuk yang kedua kalinya merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Kemhan dan TNI, setelah sebelumnya pada Laporan Keuangan Kemhan dan TNI tahun 2018 juga meraih predikat yang sama WTP dari BPK RI. Hal ini juga menjadi komitmen nyata seluruh jajaran Kemhan dan TNI yang telah diwujudkan melalui berbagai upaya perbaikan secara terus menerus dengan selalu bersinergi dengan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan instansi terkait.

Hadir pada acara penyerahan laporan hasil BPK RI atas laporan keuangan Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2019 ini; Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S. dan Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, S.I.P., M.M,. Hadir pula sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mebes TNI dan Angkatan serta pejabat di lingkungan BPK RI.***

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kunjungan Kerja Menhan RI ke Sesko TNI Bandung

Menhan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), guna memberikan pembekalan kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) XLVII Sesko TNI, di Bandung Jawa Barat, Jumat (10/7). Dalam kunjungannya tersebut, Menhan disambut Komandan Sesko TNI Marsdya TNI Dedy Permadi, S.E., M.M.D.S., beserta jajarannya dengan upacara jajar kehormatan.

Kepada Pasis Dikreg, Menhan menyampaikan Pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Tugas. Diungkapkan Menhan untuk menghadapi tantangan dan ancaman, dirumuskan beberapa pokok kebijakan umum pertahanan negara yang meliputi kebijakan pertahanan militer dan nirmiliter.

Pokok-pokok kebijakan pertahanan militer terdiri atas kebijakan pembangunan, pembinaan kemampuan, pengerahan dan penggunaan kekuatan, regulasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan kebijakan pertahanan nirmiliter terdiri dari kebijakan pembangunan, pembinaan kemampuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya nasional, regulasi, anggaran, pengawasan dan pengendalian, serta kebijakan penyelenggaraan. Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini hendaknya menjadi pedoman bagi Menteri atau Pimpinan Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.

Untuk itu Kemhan dan TNI agar menjadi penggerak sekaligus pendorong bagi Kementerian/Lembaga lainnya dalam mengimplementasikan Kebijakan Umum Pertahanan Negara ke dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara melalui program kerja, baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek. “Pasis harus siap dan berani mati untuk kedaulatan dan kehormatan bangsa seperti yang telah dilakukan Komandan Batalyon I Gusti Ngurah Rai, Daan Mogot dan Yos Sudarso,” pesan Menhan kepada Pasis TNI – Polri.

Sebelum memberi pembekalan kepada Pasis TNI, Menhan berkesempatan mendengarkan paparan yang disampaikan Direktur PT Pindad Abraham Mose. Direktur PT Pindad menjelaskan mengenai produk hankam, produk industrial berupa alat mesin pertanian (alsintan) dan dukungan untuk covid-19 berupa ventilator dan mobile lab.

Pada kesempatan itu Direktur PT. Pindad mengutarakan tentang rantis ringan 4×4, medium tank harimau, kemampuan mortir PT Pindad, retrofit meriam S-60 dan munisi 57 mm. Selain itu juga dijelaskan hal yang terkait dengan Harwat Tank Scorpion, Leopard dan AMX-13 serta senapan serbu untuk Koppasus bekerjasama dengan Caracal.

Pembekalan kali ini diikuti 166 Pasis TNI – Polri dari 170 siswa Dikreg XLVII Sesko TNI dimana empat diantaranya adalah siswa mancanegara. Empat siswa mancanegara tersebut berasal dari India, Pakistan, Filipina dan Singapura. Dalam kunjungannya ke Sesko TNI, Menhan meninjau display rantis dan memberikan bantuan 14 buah judul buku yang masing-masing judul berjumlah 200 eksemplar dimana dua buah diantaranya merupakan karangan Menhan.***

Presiden RI Didampingi Menhan Kunjungi Kesiapan Lokasi "Food Estate" di Kalteng Untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kamis (9/7) mendampingi Presiden RI Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengunjungi Lokasi "*Food Estate*" di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang. Presiden dijadwalkan untuk meninjau lokasi *Food Estate* dan meninjau saluran primer induk UPT A5 di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

Dalam peninjauan ke Kabupaten Kapuas, Presiden RI didampingi Menhan melaksanakan peninjauan panel dan dan lokasi *Food Estate* di Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup, dan lokasi *Food Estate* di Belanti Kecamatan Pandih Batu di Kabupaten Pulang Pisang.

Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah memberikan penekanan mengenai rencana pembangunan dan pengembangan kawasan *"Food Estate"* dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara. Dalam pengembangan kawasan *"Food Estate"* di Kalteng, Kementerian Pertahanan bersinergi bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik mulai siswa pertanian, mahasiswa dan masyarakat untuk menjadi bagian pembangunan daerah Kalteng untuk lebih maju lagi dan sejahtera.

Presiden RI Joko Widodo beserta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengunjungi Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Aula Jaya Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam kunjungan tersebut Presiden RI dan Menhan mendapatkan paparan dari Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden RI juga memberikan pengarahan melalui *video conference* mengenai Penanganan Covid-19 Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Tengah yang diskusinya dipandu oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Turut mendampingi Presiden RI dan Menhan dalam kunjungan ke Provinsi Kalimantan Tengah ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.***

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kemhan dorong Indhan kembangkan Faskes untuk lawan Covid-19

Sumber foto : www.tribunnews.com

Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendorong Industri Pertahanan (Indhan) mengembangkan fasilitas kesehatan (Faskes) yang inovatif untuk membantu pemerintah melawan pandemi Covid-19.

"Memperkuat alat kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam melawan pandemi. Kita ingin punya Faskes yang mumpuni dan hasil produksi Indhan dalam negeri sesuai arahan Pak Presiden Jokowi," kata Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono kala melihat Fasilitas Manufaktur Bio Safety Level milik Pindad di Bekasi, Kamis (16/7).

Wamenhan dalam kunjungan ke fasilits milik Pindad itu melihat langsung prototype lab BSL-2+ (BSL 3) yang sudah lengkap dengan ruang positif pressure dan ruang isolasi neg-nya. Di *prototype* itu juga ada peralatan PCR test, dan BSC untuk sample dan hasil ujinya.

Bio Safety Level atau level keselamatan biologi adalah level atau tingkatan keselamatan yang diperlukan untuk penanganan agen biologi. Keselamatan biologi level 3 ditujukan bagi fasilitas klinis, diagnostik, riset atau produksi yang berhubungan dengan agen-agen eksotik yang dapat mengakibatkan potensi terkena penyakit berbahaya. Contoh agen biologi kategori keselamatan biologi level 3 antara lain: Anthrax, HIV, SARS, Tubercolosis, virus cacar, thypus dan avian influenza.

"Lab BSL-2+ ini merupakan terobosan yang sangat baik dalam rangka untuk mendorong mewujudkan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan. Hal yang harus diperhatikan adalah Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ditingkatkan terus. Sesuai instruksi Pak Presiden, harus diprioritaskan pengembangan ekosistem dalam negeri," katanya.

Diharapkannya, inovasi *Bus Mobile Laboratorium* BSL-2+ yang dibuat Pindad itu bisa membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mempercepat waktu pemeriksaan pasien dengan tes PCR. "Pelaksanaan PCR test itu membutuhkan sarana laboratorium untuk melaksanakan testing dan tracing terutama daerah yang menjadi episentrum. Kehadiran Mobile Lab BSL-2+ ini akan bisa menjawab tantangan kecepatan dan penetrasi wilayah," katanya.

Pada kesempatan sama Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan *Bus Mobile Laboratorium* BSL-2+ yang dibuat perseroan menggunakan standar WHO dan dalam proses sertifikasi dari lembaga kesehatan internasional yang dibawah naungan PBB itu. "Prototype sekarang hasil kerjasama dengan RS Yarsi. Kita punya kapasitas produksi sebulan untuk 15 unit dengan TKDN sudah 62%", jelas Abraham. (Biro Humas Setjen Kemhan).***

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wamenhan Bersama Wamen LHK Tinjau Lahan "*Food Estate*" di Kalteng

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong melakukan Rabu, Pagi (1/7) melakukan peninjauan secara langsung lahan yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan "*Food Estate*" di Kalimantan Tengah. Turut pula dalam peninjauan ini, Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Dody Tri Sunu dan juga Tim Pakar / Ahli dari LIPI, UNEJ, ITB dan IPB.

Peninjauan diawali ke Desa Belanti Siam, Kecamatan Pande batu, Kabupaten Pulang Pisau. Wamenhan dan rombongan disambut langsung oleh Bupati Pulang Pisau Ir. Edy Pratowo dan meninjau tanaman padi yang tumbuh subur menghijau dan tidak lama lagi panen di daerah tersebut.

Selanjutnya, Wamenhan melanjutkan peninjauannya ke Desa Batara, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Wamenhan disambut oleh Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas. Rencananya, wilayah tersebut akan dikembangkan menjadi lahan untuk pengembangan tanaman jagung dan singkong.

Wamenhan mengatakan, kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait rencana pembangunan dan pengembangan kawasan "*Food Estate*" di Kalteng dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional yang merupakan bagian dari kedaulatan negara.

Dalam pengembangan kawasan "*Food Estate*" di Kalteng, Kementerian Pertahanan bersinergi bersama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN.

"Kunjungan ini untuk melihat potensi kalau kita bangun ekonomi disini dengan tanaman pangan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dan juga untuk Indonesia secara umum", ungkap Wamenhan.

Dari sisi pertahanan, Kemhan melihat bahwa Indonesia harus mampu dan memiliki ketahanan nasional di bidang pangan. Hadirnya pembangunan kawasan "*Food Estate*", juga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Nanti ada tiga yang akan kita lihat, kalau tadi kita sudah pergi ke deket lahan gambut itu, itu padi. Lalu yang kedua di Barito Timur yaitu jagung dan singkong", jelasnya.

Wamenhan menyatakan rasa optimisme bahwa kedua tanaman tersebut yakni jagung dan singkong memiliki prospek yang bagus untuk peningkatan ekonomi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

"Cadangan pangan ini sudah menjadi bagian penting bagi pertahanan negara. Kalau pangan ini lemah, itu yang sangat berbahaya. Apalagi dimasa sekarang ini dimana wabah pandemi Covid -19 telah berdampak kepada ekonomi, kalau pangan kita ngga kuat, terus kemudian pamdemi-nya berlansung panjang, tidak ada solusi apa apa, itu yang sangat berbahaya", ungkap Wamenhan.

Sementara itu, Gubernur Kalteng menyambut baik dan mendukung rencana Pemerintah Pusat yang menjadikan Kalteng sebagai pusat industri pangan dan penyanggah ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik mulai siswa pertanian, mahasiswa dan masyarakat untuk menjadi bagian pembangunan daerah Kalteng untuk lebih maju lagi dan sejahtera.***

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

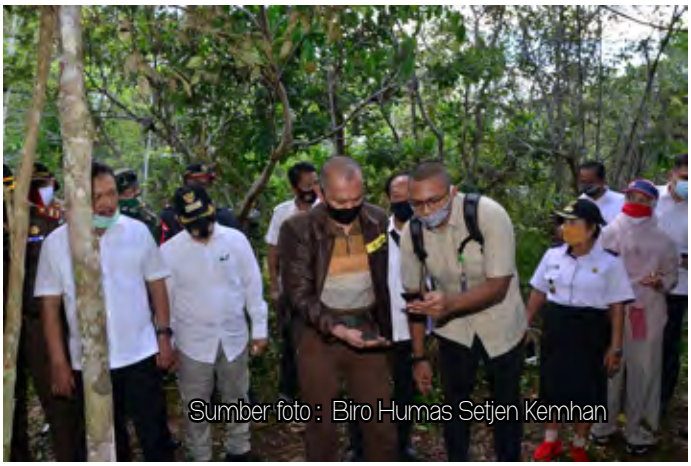
Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Wamenhan: Kekuatan Ketahanan Pangan Tak Kalah Penting dengan Kekuatan Senjata

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa kekuatan ketahanan pangan tidak kalah pentingnya dengan kekuatan senjata, terlebih dalam menghadapi situasi saat ini seperti dampak akibat dari pandemi Covid-19. Untuk itu, Indonesia harus memiliki cadangan pangan yang memadai.

Hal tersebut diungkap Wamenhan saat menghadiri dan memimpin Rapat tentang Pembahasan dan Pengelolaan Kawasan Eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (23/6) di kantor Kementerian PUPR, Jakarta.

Rapat dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr. Ir. M Basoeki Hadimoeljono, M.Sc dan juga dihadiri pejabat perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN.

Rapat membahas mengenai aksi bersama kementerian / lembaga dalam pengembangan kawasan "*Food Estate*" di Kalimantan Tengah dalam upaya mendukung program penguatan ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, Kementerian Pertahanan menginginkan

Adanya peningkatan ketahanan pangan untuk mengantisipasi dampak wabah penyakit seperti Covid-19 yang bisa saja terjadi kembali di masa depan.

Belajar dari situasi yang terjadi, Covid-19 telah berdampak tidak hanya pada kesehatan tetapi juga berdampak terhadap ketahanan ekonomi nasional. "Belajar dari sejarah perang, kalau kita miliki senjata tanpa kekuatan cadangan pangan akan kocar – kacir juga,"ungkap Wamenhan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka Kemhan bersinergi bersama dengan instansi terkait antara lainnya yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian BUMN berencana mengembangkan kawasan food estate diantaranya di Kalimantan Tengah.

"Kita harus punya cadangan pangan dan punya lahan tetap untuk tanaman pangan yang akan dikembangkan. Jadi lahan tersebut tidak boleh berubah fungsi,"ungkapnya.

Menurut Wamenhan, ada tiga tanaman pangan utama yang perlu dikembangkan untuk ketahanan pangan nasional yakni tanaman padi, jagung dan singkong. Tiga tanaman itu kalau bisa dijalankan dengan lahan yang memadai akan sangat berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bicara pengembangan ketahanan pangan, menurut Wamenhan tidak selalu terkait soal beras, tetapi juga bisa jagung dan singkong. Bahkan, menanam singkong lebih mudah dan infrastrukturnya dan potensi hasilnya lebih besar.

"Bayangkan, turunannya itu luar biasa untuk industri pangan kalau kita jalankan. Misalnya untuk jagung dan singkong, disampingnya bisa dilanjutkan dengan ternak sapi," papar Wamenhan.***

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sekjen Kemhan RDP dengan Komisi I DPR RI Bahas Ketahanan Nasional Atasi Virus Corona

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR tentang Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona, Rabu (8/7), di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta.

RDP yang dihadiri institusi negara yaitu Kemhan, Asrenum TNI, Sestama BIN, Sestama BSSN membahas Langkah Strategis dalam Penanganan Covid-19 untuk Ketahanan Nasional berikut alokasi anggarannya.

RDP tersebut membahas tentang tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat tanggal 29 Juni 2020, Laporan perkembangan persiapan peralatan dan sarana prasarana pada 110 Rumah Sakit TNI Rujukan Covid-19, Penjelasan mengenai penguatan fungsi nubika pada organisasi Kemhan/TNI, Alokasi pagu anggaran pada Perpres 54/2020 dan kebutuhan minimal anggaran TA. 2020 untuk penanganan pandemic covid-19, RKP dan RKA TA. 2021 dalam penanganan covid-19.

Turut mendampingi dalam acara tersebut Dirjen Pothan Kemhan, Kabalitbang Kemhan, Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan, Dirrenprogar Ditjen Renhan Kemhan, Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan, Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan Karorenku Setjen Kemhan dan Karo Humas Setjen Kemhan. ***

Sekjen Kemhan : Pada Implementasi Tatanan Normal Baru, Kesehatan & Keselamatan Pegawai yang Paling Utama

Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto M.D.S. menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Pertahanan masih berperang dalam menangani situasi Pandemi Covid-19, namun juga harus siap dalam pengimplementasian tatanan normal baru guna mendukung produktivitas kerja sesuai dengan instruksi Pemerintah. Pada kondisi *New Normal* ini kesehatan dan keselamatan Pegawai Kemhan tetap menjadi yang paling utama.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto M.D.S., Senin (22/6) memimpin Rapat Internal Pembahasan Satuan Kerja Biro Setjen Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2020 di Kantor Kemhan, Jakarta.

Sekjen menekankan kepada para Kapus dan Karo Setjen Kemhan agar memantau dan mengawasi terus secara ketat penerapan protokol kesehatan di satkernya masing-masing. Dan untuk senantiasa memastikan pelaksanaan tugas dan kegiatan tetap efektif, produktif dan aman, diupayakan tidak ada kerja terlalu panjang/lembur, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas.

Terkait dengan *New Normal*, Pemerintah sudah mengatur tentang sistem kerja yaitu seperti saat ini sekitar 70% yang berdinas di kantor/WFO, yang mekanisme pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Satker didasarkan pada tuntutan kerja masing-masing satker. Saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh Karopeg Setjen Kemhan untuk melihat efektivitasnya

Rapat internal ini diikuti oleh para Kepala Satuan Kerja Kemhan diantaranya; Kapuslaik Kemhan Laksma TNI Teguh Sugiono, S.E., M.M., Kapusrehab Kemhan Brigjen TNI dr Arofi S. Surachman, SpBP-RE(K), MARS, Kapuslapbinkuhan Kemhan Laksma TNI Agus Supriadi, S.Sos., M.M., Kapusdatin Kemhan Brigjen TNI Dominggus Pakel, S.Sos., M.M.S.I., Karorenku Setjen Kemhan Brigjen TNI Amat Sugiyono, S.E., M.M., Karopeg Setjen Kemhan Brigjen TNI Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc., Karo Hukum Setjen Kemhan Marsma TNI Yowono Agung Nugroho, S.H., M.H., Karoum Setjen Kemhan Marsma TNI Yusuf Jauhari, Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Ignatius Eko Djoko P. S.A.P., S.E., M.M., Karo Ortala Setjen Kemhan Brigjen TNI A.B. Budi Wibowo, dan Karo Turdang Setjen Kemhan Brigjen TNI Jamaruba Silaban S.H., M.H.***

Irjen Kemhan Menghadiri Penandatanganan Maklumat Pelayananan Itjen Kemhan Tahun 2020

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana Menghadiri Penandatanganan Maklumat Pelayanan Itjen Kemhan Tahun 2020, Rabu (8/7) di Gedung Gatot Soebroto Kemhan Jakarta.

Irjen Kemhan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu program Reformasi Birokrasi yang harus diawali dengan satu kebulatan tekad dan komitmen yang masif dan komprehensif dari seluruh pegawai Itjen Kemhan menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBK/WBBM).

Secara umum, komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas Itjen Kemhan telah disepakati oleh seluruh pegawai Itjen Kemhan berupa penandatanganan bersama di atas media yang telah disediakan pada hari ini juga dipimpin oleh Ses Itjen Kemhan Brigjen TNI Dwi Mastono.

Lebih lanjut Irjen menyampaikan bahwa pelayanan prima merupakan salah satu variabel dan parameter Zona Integritas yang menjadi tolak ukur seberapa maksimal serta optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dari Aspek Pelayanan, baik pelayanan kepada publik maupun Stakeholder terkait.

Melayani dalam makna yang luhur dan hakiki merupakan upaya menuju perbaikan kinerja organisasi yang tak mungkin terwujud hanya dengan pengalaman, kompetensi, dan sumber daya.

Irjen juga menyampaikan melayani harus menjadi ikrar seluruh individu yang dapat membentuk karakter orang-orang di dalam organisasi yang tanpa atau dengan sadar akan mewarnai organisasi itu sendiri sehinngga terbentuk suatu budaya organisasi.

Acara tersebut dihadiri oleh Ses Itjen Kemhan Brigjen TNI Dwi Mastono, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Inspektur IV, Inspektur V, Karo Ortala, Karo TU, Karoum, Karo Humas (diwakili Kabagbra Kolonel Adm Agus Setyo Hartono).***

Peran Industri Pertahanan melalui Transformasi Produk Alpalhankam menjadi Produk Strategis Guna Penanganan Covid-19

Oleh :
Letkol Tek Nanang Firmansyah, S.T., M.T.
Kasi Ekspor/Impor Subdit Perizinan Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan

Pendahuluan.

Corona Virus Disease atau Covid-19 telah ditetapkan sebagai Pandemi Global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, berdasarkan pertimbangan pada tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan merujuk pada kharakteristik dari suatu pandemi, yaitu: merupakan virus jenis baru, dapat menginfeksi banyak orang dengan mudah, serta bisa menyebar antar manusia secara efisien. (Laras, 2000).

Melansir data dari halaman Worldometers, per tanggal 23 Juli 2020 Corona Virus telah menginfeksi 15,3 Juta Orang dengan tingkat *fatality rate* (FR: 4,2%) mencapai lebih dari 600.000 orang di seluruh dunia dan belum menunjukkan tanda-tanda berhenti atau mereda penyebarannya.

Pandemi global Covid-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga berdampak terhadap semua sektor seperti perekonomian yang memicu terjadinya gelombang resesi yang diprediksi akan dialami oleh banyak negara di dunia seperti dilaporkan, Hongkong, Singapura, Korsel, Jerman, Perancis dan bahkan AS yang telah masuk jurang resesi ekonomi (cnbcindonesia.com, 2020). Gelombang resesi ekonomi sebagai akibat krisis Pandemi global ini tentunya juga akan berdampak terhadap sektor Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dari suatu negara.

Sejak di *Publish* nya penyebaran Pandemi Covid-19, pada 2 Maret 2020, Pemerintah telah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 melalui KEP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Sumber: Wikipedia: Covid-19 Pandemic Data/International Medical Cases-Visual Editor

Bagaimana dengan Indonesia?

Dari data Kementerian Kesehatan penyebaran Covid-19 di Indonesia sejak di *publish* ditemukannya kasus baru sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 telah mencapai 113.134 kasus positif. Kasus pasien yang meninggal pun juga masih bertambah, sehingga total pasien yang meninggal secara nasional mencapai 5.302 kasus (Tim Komunikasi Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Covid, 2020)

Sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai pengganti Satgas Covid-19.

Meskipun Satgas nasional telah dibubarkan, namun bukan berarti perang melawan Covid-19 menjadi terhenti. Kebijakan untuk menekan dan/atau menghentikan laju penyebaran virus terus dilakukan dengan mengerahkan segenap potensi Sumber Daya Nasional (SDN) yang ada, dimana setiap unsur K/L

pemerintah diharapkan dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui langkah-langkah yang terkoordinasi.

Sementara itu Kementerian Pertahanan sebagai salah satu unsur instansi pemerintah yang bertanggung jawab di sektor pertahanan telah melakukan berbagai langkah dan upaya proaktif dalam upaya mendukung penanganan Covid-19. Upaya Kemhan untuk mempersempit penyebaran Covid-19 antara lain dengan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kedinasan. Kemhan juga telah membentuk relawan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Bidang Kesehatan dalam membantu penanganan Covid-19.

Langkah dan upaya proaktif Kemhan tentunya disesuaikan dengan lingkup tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan serta pelibatan TNI melalui implementasi dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (*Military Operation Other Than War/MOOTW*).

Langkah dan Upaya Strategis Kemhan Dalam Mendukung Penanganan Covid-19

Sebagaimana telah disampaikan dalam poin-poin penjelasan Sekjen Kemhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR pada Tanggal 8 Juli 2020 yang juga merupakan tindaklanjut dari RDP sebelumnya pada tanggal 29 Juni 2020 khususnya langkah strategis dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19 gelombang ke-2 dan ke-3, dituangkan dalam 9 (sembilan) poin strategi yaitu :

Strategi Pertama, Refocusing kegiatan manufaktur/ produksi Industri Pertahanan untuk semaksimal mungkin mendukung pelaksanaan protokol kesehatan sesuai standar WHO. Kemhan menganggap bahwa Virus sebagai bagian dari perang tak kasat mata namun dapat mematikan. 14 (empat belas) item produk protokol kesehatan yang menjadi concern Kemhan akan ditransformasikan untuk dapat diproduksi oleh Industri Pertahanan secara massal.

Strategi Kedua, Penerapan New Normal sebagai Safety First dan Trend Mode untuk menghindari Corona Virus. Strategi Ketiga, Pemanfaatan sarana prsarana Virtual Technology.

Strategi Keempat, Membangkitkan sektor pertanian termasuk peternakan dan perikanan dengan memanfaatkan dan mengedepankan metoda Stay at Home.

Strategi Kelima, Membuka akses ibadah sebagai sarana membangkitkan spritual masyarakat dengan tetap menerapkan Social dan Physical Distancing.

Strategi Keenam, Merencanakan belanja negara dengan 2 (dua) alternatif, yaitu: pertama rencana program dan anggaran mengacu pada Renstra yang ada dan kedua, menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 apabila terjadi gelombang pandemi kedua, ketiga dan berikutnya.

Strategi Ketujuh, Melakukan inovasi dan improvisasi secara cepat atau Extra Ordinary dengan tidak mengabaikan regulasi yang ada.

Strategi Kedelapan, Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar Stakeholder terkait untuk mewujudkan kesatuan langkah dalam menangani pendemi baik lingkup nasional maupun internasional.

Strategi Kesembilan, Menyiapkan Sarpras penampungan dan karantina bagi masyarakat (ODP, OTG atau yang terjangkit virus corona) dalam mengatasi keterbatasan daya tampung rumah sakit dengan penentuan lokasi yang memperhatikan keselamatan ekosistem.

Transformasi Peran Industri Pertahanan Di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan, langkah dan upaya Kemhan dalam penanganan Pandemi Covid-19 selain diwujudkan dalam bentuk konkrit juga dilakukan upaya-upaya konstruktif dengan membangun komunikasi dan *capacity building* bersama komunitas internasional,

Menerima dan sekaligus mendistribusikan bantuan Alat Kesehatan (Alkes) dari beberapa negara sahabat, diantaranya melalui *Humanitarian Aid* dari RRT, *ASEAN Defence Senior Offcials Meeting* (ADSOM) atau *ASEAN Defence Minister Meeting* (ADMM) sebagai komunitas sesama ASEAN, termasuk berbagai partisipasi bantuan dari Industri Nasional seperti, PT. Thales Indonesia, PT. Tower Bersama Tbk (TBIK), PT. Indadi Setia, dan lain-lain.

Langkah nyata lainnya dari Kementerian Pertahanan dalam mengimplementasikan penerapan

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN yaitu dengan Pembentukan Relawan Komduk Hanneg Bidang Kesehatan (profesi Dokter dan Perawat) sebanyak 293 relawan. Para relawan Komdukkes tersebut telah ditugaskan ke Rumah Sakit Dr. Suyoto Pusrehab Kemhan dan Rumah Sakit-Rumah Sakit yang dioperasikan oleh TNI. Sebelumnya masing-masing relawan Komduk Hanneg tersebut juga telah dibekali dengan Bimbingan Teknis/Bimtek selama 2 minggu dari 20 April s.d 4 Mei 2020 di Pusdiklat Belneg Badiklat Kemhan RI. (Kemhan.go.id, 2020).

Secara khusus Kementerian Pertahanan juga telah menggerakkan sektor Industri Pertahanan yang berada di bawah pembinaan Kemhan untuk dapat memproduksi Alat Kesehatan (Alkes) sebagai pendukung utama dalam perang melawan Covid-19. Langkah dan upaya Kemhan ini diwujudkan melalui 2 (dua) tahap yaitu :

a) Penyusunan Database Industri Pertahanan yang dapat mendukung produksi Alkes seperti APD, Masker Non Medis, Kendaraan Ambulance.

b) Pemetaan Database Kesiapan Industri Nasional yang dapat mendukung produksi Alkes dan produk dukungan lain yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 dan pelaksanaan *New Normal* seperti produk: APD, Masker, Sarung tangan Medis, Hand Sanitizer, Etanol, Ventilator dll.

Transformasi produksi Industri Pertahanan memiliki nilai strategis dalam mendukung upaya-upaya dalam percepatan penanganan Pandemi Covid-19, selain dapat mendorong aktifitas perekonomian juga membangkitkan inovasi SDM Industri Pertahanan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia.

Transformasi-transformasi semacam ini telah banyak dipraktekkan dalam situasi peperangan berskala global seperti; Industrialisasi perusahaan Jerman untuk memproduksi peralatan tempur baik Tank, Rudal Pesawat Terbang dan Kapal Perang saat menghadapi Perang Dunia Ke II dan Ke-II (*World War/* WW). Demikian halnya Jepang yang dikenal memiliki industri berteknologi tinggi dikerahkan untuk mendukung ambisi Jepang dalam WW II di wilayah Asia-Pasifik.

Meskipun Pandemi Covid-19 ini tidak dapat disamakan dengan perang fisik dalam sejarah perang Dunia, namun dampaknya memiliki eskalasi yang lebih luas dan sistematis yang dapat meruntuhkan sendi-sendi Pertahanan Negara.

Dorongan Kemhan untuk mewujudkan Industri Pertahanan dalam melakukan transformasi produk yang dapat mendukung perang melawan Covid-19

Ventilator Produk PT. Pindad

Sumber : DPD RI dilansir dari Media Indonesia, Ventilator Buatan Pindad Harga 10 - 100 Juta Rupiah, 21 April 2020

Sumber : Humas Pemprov Jabar dilansir dari Pikiran Rakyat, Pemrov Jabar Beli Ventilator Buatan PT DI dan PT Pindad, Penuhi Kebutuhan RS Rujukan, 25 April 2020

Sumber : www.sritex.co.id, Sritex Official Store, Database Produk Covid-19 Industri Pertahanan

PT. Dirgantara Indonesia telah mewujudkan transformasi produk pertahanannya menjadi produk seperti : APD, Tabung Oksigen, Masker ruang operasi dan Bilik Desinfektan.

Sedangkan PT. Sritex sebagai salah satu industri terbesar yang bergerak dibidang textile di Indonesia dengan produk-produk seragam militer yang telah banyak digunakan oleh militer diberbagai negara di dunia juga melakukan transformasi produk untuk memproduksi APD dan Masker Non Medis.

Industri Pertahanan lainnya yang melakukan transformasi produk antara lain: PT. Ridho Agung Mitra Abadi dengan produk J-Forces (APD, Coat Microporous, Jaket Pelindung Diri, dan Topi Pelindung), PT. Jala Berikat Nusantara (Kendaraan Ambulance), PT. Respati Solusi Rekatama (Mobile Fog Cannon, Robot Rumah Sakit), PT. Adetex (Hazmat Suit, Masker Kain), PT. Infoglobal Teknologi Semesta (Ventilator), PT. Karya Tugas Anda (Field Ambulance) dll.

Kedepan Kementerian Pertahanan juga melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap ancaman dan perang di masa depan dengan mulai memperkuat Pertahanan Negara sektor nir militer dengan melakukan transformasi di bidang penyiapan SDM dengan membentuk Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer dan Fakultas Teknik Militer di Universitas Pertahanan.

Sumber : J-Forces.co.id

ditujukan kepada 122 (seratus dua puluh dua) Industri Pertahanan yang telah terdaftar di Kementerian Pertahanan baik BUMN maupun BUMS. Namun hanya beberapa industri Pertahanan tertentu yang memiliki keterkaitan langsung dengan 13 (tiga belas) item produk yang dapat mendukung produksi Alkes.

BUMN klaster National Defence and Hightech Industries/NDHI, PT. Pindad dan

Sumber : respati.co.id; Database Produk Covid-19 Industri Pertahanan

Sumber : respati.co.id; Database Produk Covid-19 Industri Pertahanan

Sumber : tugasanda.com/tad/

Antisipasi terhadap bentuk ancaman perang masa depan ini telah dibuktikan dengan munculnya Virus Corona yang tidak menutup kemungkinan akan terulang dimasa depan sebagai bagian dari aktifitas militer negara asing dalam memanfaatkan teknologi dan Virologi sebagai bagian dari senjata Nuklir Biologi dan Kimia (Nubika).

Pembentukan satuan-satuan TNI yang memiliki kemampuan dalam mengatasi perang Nubika, salah satunya dibidang Biologi, dimana Prajurit TNI yang bersumber dari Universitas Pertahanan (UNHAN) diharapkan dapat menjadi tulang punggung utama dalam menghadapi perang Nubika serta mampu menciptakan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bagian dari Zeni Tempur Nubika bagi sterilisasi tenaga medis yang menangani perang yang memanfaatkan teknologi Biologi.

Kesimpulan

Peran industri pertahanan dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19 melalui transformasi produk alpalhankam menjadi produk-produk strategis selama ini sudah banyak dilakukan dengan cukup baik. Disamping itu Kementerian Pertahanan telah melalukan langkah penguatan Pertahanan Negara sektor nir militer dengan melakukan transformasi bidang SDM. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer dan Fakultas Teknik Militer di Universitas Pertahanan.

Namun demikian, perlu langkah-langkah yang lebih strategis dan diperkuat dengan penyusunan regulasi yang lebih baik guna memitigasi adanya ancaman pandemi serupa Covid-19 yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang. Sinergitas dan integrasi antar industri pertahanan, Kementerian/Lembaga, akademisi dan instansi terkait akan sangat menentukan keberhasilan penanganan pandemi serupa melalui produk-produk yang dihasilkan.***

Referensi

- *APD Buatan Sritex Penuhi Standar WHO.* Diambil pada tanggal 30 Mei 2020 dari https://banyumas.tribunnews.com/2020/05/30/apd-buatan-pt-sritex-penuhi-standar-who.
- Biro Humas Setjen Kemhan. *Menhan Lepas 293 Relawan Komduk Hanneg Bidang Kesehatan Bantu Penanganan Covid-19*. Diambil tanggal 4 Mei 2020 dari https: //www.kemhan.go.id/2020/05/04/menhan-lepas293-relawan-komduk-hanneg-bidang-kesehatan-bantu-penanganan-covid-19.html
- Laras, A. (2020, 12 Maret) *WHO tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?*. Diambil pada tanggal 12 Maret 2000 dari https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya
- *Pemerintah Akui Angka Kematian Corona di Indonesia Di Atas Rata-Rata Dunia.* Diambil pada tanggal 6 Juli 2020 dari http://nasional.okezone.com.
- *6 Negara Alami Resesi & Prediksi Ngeri IMF Soal Krisis Global*. Diambil pada tanggal 2 Agustus 2020 dari https://www.cnbcindonesia.com/market/20200802093958-17-176896/6-negara-alami-resesi-prediksi-ngeri-imf-soal-krisis-global.
- Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Per 3 Agustus 2020, Total Pasien Sembuh dari Covid Sebanyak 70.237 Orang* diambil pada tanggal 3 Agustus 2020 dari https://covid19.go.id/p/berita/3-agustus-2020-total-pasien-sembuh-dari-covid-sebanyak-70237-orang

Sumber foto : www.mejaredaksi.com

Peningkatan Kerjasama Melalui Forum Regional dan Pertahanan Internasional dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19

Oleh :
Mayjen TNI Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia selalu menekankan baPenyebaran wabah Covid-19 yang terjadi secara global telah menimbulkan dampak yang luar biasa besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Wabah Covid-19 telah menyebabkan efek negatif terhadap perekonomian nasional. Para pelaku di sektor rill mengalami kesulitan berusaha sedangkan masyarakat menderita karena kenaikan harga semua kebutuhan sehari - hari.

Kehidupan sosial budaya seperti kegiatan ibadah, perayaaan hari raya keagamaan dan pendidikan juga terdampak serius. Kegiatan ibadah rutin di tempat-tempat ibadah berbagai agama terpaksa dihentikan atau sangat dibatasi untuk mencegah penyebaran wabah lebih luas. Hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan perayaan hari raya keagamaan dan kegiatan belajar di sekolah - sekolah.

Sektor kesehatan menjadi bidang yang paling terdampak, tenaga medis dan para medis serta tempat pelayanan kesehatan masyarakat, terutama rumah sakit, kewalahan melayani masyarakat akibat besarnya jumlah pasien yang membutuhkan pertolongan akibat terinfeksi Covid-19. Keterbatasan fasilitas rumah sakit seperti ventilator dan alat perlindungan diri (APD) untuk dokter dan perawat menimbulkan persoalan yang sangat serius. Akibatnya tidak sedikit dokter dan perawat di berbagai rumah sakit tertular Covid-19 dan meninggal dunia.

Sampai saat ini penyebaran wabah Covid-19 masih terus berlangsung dan tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan berakhir. Sementara itu upaya untuk menemukan vaksin dan obatnya juga belum berhasil. Sementara

Pemerintah Indonesia telah mencoba bertindak sigap dengan mengambil berbagai kebijakan dan langkah untuk melakukan penanganan.

Langkah dan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Wabah Covid-19

Sebagai langkah awal penanganan wabah Covid-19 Pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan keprotokolan khusus untuk penanggulangan penyebaran wabah ditengah-tengah masyarakat. Pemerintah mengambil langkah *extra ordinary*, bukan tindakan yang bersifat *business as usual*, dikarenakan pelaksanaannya belum dapat diakomodasi oleh peraturan perundangan yang ada. Langkah awal, pada 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Perppu tersebut Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19.

Selanjutnya pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Perpu No. 1 Tahun 2020. Melalui Perpres ini anggaran dari beberapa kementerian disesuaikan, ada yang dipotong dan ada yang ditambah, dalam rangka penanganan Covid-19.

Kebijakan strategis lain yang diambil Pemerintah adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan aturan tersebut Pemda dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Menanggapi langkah dan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera melaksanakan tindaklanjut yang diperlukan. Terkait dengan penerapan PSBB misalnya, Kemhan bersama TNI secara proaktif segera berkoordinasi dengan Pemerintah, baik Pemerintah Daerah dan Pusat, untuk membantu pelaksanaannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain memobilisasi aset dan fasilitas yang tersedia ke masing-masing daerah untuk membantu melayani masyarakat, terutama melalui penyediaan layanan kesehatan, distribusi logistik, dan pemakaman untuk para korban Covid-19.

Peran Kemhan dan TNI tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak karena dinilai berkontribusi besar terhadap upaya penerapan PSBB di berbagai daerah di Indonesia.

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sumber foto : Kedcom.id

Sebelumnya, yakni pada 2 Februari 2020, TNI juga turut mendukung upaya Pemerintah dalam mengevakuasi 238 WNI yang terjebak *lockdown* di Wuhan, Provinsi Hubei, China akibat wabah Covid-19. Ratusan WNI tersebut menjalani karantina selama 14 hari Lanud Raden Sadjad, Kabupaten Natuna sebelum dipulangkan ke daerah masing – masing. Pada tanggal 26 Februari 2020 TNI kembali membantu Pemerintah dalam mengevakuasi 188 WNI yang menjadi kru kapal pesiar World Dream. Mereka perlu dievakuasi karena kapal tersebut telah terpapar Covid-19.

Selain perbantuan terhadap Pemda dalam penerapan PSBB dan evakuasi WNI tersebut, Kemhan sebenarnya juga melakukan upaya dan langkah strategis lain yang tidak banyak diketahui masyarakat, yaitu dengan menggunakan forum kerja sama internasional di bidang pertahanan, baik secara bilateral maupun multilateral, dalam percepatan penanganan wabah Covid-19.

Percepatan Penanganan Wabah Covid-19 Melalui Kerja Sama Internasional Pertahanan

Menurut Permenhan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan, kerja sama internasional dalam bidang pertahanan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan diplomasi negara di dunia internasional. Kerja sama internasional pertahanan bertujuan antara lain untuk membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*) dan pembangunan kapasitas (*capacity building*) bidang pertahanan sesuai kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral.

Kegiatan kerja sama pertahanan tersebut dilakukan dengan mitra internasional yang meliputi perwakilan pemerintahan, kementerian, departemen, organisasi internasional, lembaga, instansi, dan/atau pihak swasta yang berkedudukan hukum di luar Indonesia. Adapun bentuk kegiatan kerja sama pertahanan yang dapat dilakukan antara lain pengadaan dan/atau hibah alat perlengkapan pertahanan atau kerja sama teknik, penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, serta kerja sama bantuan kemanusiaan akibat bencana.

Dalam mendukung Pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19, Kemhan juga menggunakan jalur kerja sama pertahanan dengan negara sahabat, baik yang terjalin secara bilateral maupun multilateral. Terdapat tiga bentuk kegiatan yang telah, sedang dan akan terus dilakukan oleh Kemhan terkait percepatan penanganan wabah Covid-19 yaitu penerimaan bantuan alat dan material kesehatan dari negara-negara sahabat, pemanfaatan forum kerja sama pertahanan multilateral, serta penguatan dan antisipasi keamanan regional dan internasional selama dan pasca Covid-19.

Penerimaan Bantuan Alat dan Material Kesehatan dari Negara-Negara Sahabat

Tidak berselang lama dari penetapan Covid-19 sebagai pandemi global, Kemhan mengambil langkah nyata mendukung Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di tanah air. Salah satu upaya yang dilakukan Kemhan adalah dengan menggunakan jalur kerja sama internasional bidang pertahanan. Indonesia memiliki jalinanan kerja sama pertahanan yang baik dan kuat dengan banyak negara sahabat, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di belahan dunia lainnya. Dengan modal hubungan yang baik tersebut Kemhan berhasil mendapatkan bantuan logistik dari beberapa negara sahabat untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pada 23 Maret 2020 Kementerian Pertahanan, bersama Mabes TNI, sukses menggelar operasi Bantuan Kemanusiaan guna membawa alat-alat kesehatan dari Tiongkok untuk membantu Indonesia melawan penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Operasi bantuan kemanusiaan ini merupakan gagasan Menhan Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kemhan bersama Mabes TNI dengan bantuan Kementerian Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta dukungan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sejumlah perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia.

Kementerian Pertahanan RI bersama Mabes TNI mengambil langsung bantuan tersebut ke Tiongkok dengan menggunakan pesawat udara militer C-130 Hercules milik TNI AU. Bantuan yang diterima antara lain *Medical Surgical Mask*, KN95 *Respirator*, *Medical Goggles*, *Protective Jump Suit*, *Medical Boot Cover*, *Disposable Nitrile Glove*, *Infusion Pump*, *Disinfectant Sprayer 16L*, dan *Thermometer Helmet*. Alkes tersebut didistribusikan ke rumah sakit di lingkungan TNI dan Kemhan guna membantu penanganan Covid-19 di Indonesia. Kemhan kembali menerima bantuan alat kesehatan dari China untuk penanganan Covid-19 di Indonesia pada tanggal 12 Mei 2020.

Bantuan untuk Indonesia dalam menangani Covid-19 juga datang dari Pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam *Video Conference* antara *Office of Defence Coopration* Kedubes AS di Jakarta dengan perwakilan Kemhan RI dan TNI pada tanggal 10 Juni 2020 Pemerintah AS

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

menyampaikan komitmen untuk memberikan bantuan berupa tiga unit *Applied Biosystems* 7500 *Real Time PCR Systems* beserta pelatihannya kepada Kemhan dan TNI. Ketiga alat PCR beserta pelatihannya tersebut akan dialokasikan untuk RS Dustira Bandung, RS Marinir Cilandak, dan RSAU Sutomo Pontianak.

Diawal masa pandemi Pemerintah AS juga telah membantu Pemerintah Indonesia menyiapkan sistem laboratorium, mengaktifkan penemuan kasus dan pengawasan berbasis peristiwa. Pusat Pengendalian Penyakit (*Center for Disease Control / CDC*) AS misalnya, memberikan bantuan teknis kepada pejabat kesehatan Indonesia dan bekerja sama dengan BNPB.

Bantuan alat kesehatan juga diterima oleh Kemhan dari Korea Selatan dan Perancis. Pada tanggal 24 April 2020 Pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan berupa 50 ribu set test kit Covid-19. Pemerintah Korea Selatan kembali memberikan bantuan sejumlah alat kesahatan pada tanggal 11 Mei 2020 berupa *isolation clothing*, *medical google*, *disposable sterilizer*, dan *shoe cover*.

Sementara itu *Thales Group*, sebuah perusahaan Perancis yang bergerak dalam industri pertahanan, melalui anak perusahaan di Indonesia yaitu PT Thales Indonesia menyerahkan 10.000 *face shield*, 10.000 *face masks* dan 1.000 *hazmat suits*. Alat kesehatan ini disumbangkan kepada Kemhan pada tanggal 23 Juni 2020 guna membantu penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pemanfaatan Forum Kerja Sama Pertahanan Multilateral

Langkah konkrit lain yang dilakukan Kemhan adalah dengan memanfaatkan forum kerja sama multilateral bidang pertahanan, terutama di Kawasan ASEAN. Dalam rangka penanganan Covid-19 para pejabat senior pertahanan Indonesia dan negara – negara ASEAN melakukan pertemuan melalui forum virtual yaitu *ASEAN Defence Senior Officials' Meeting (ADSOM) Leaders Virtual Conference*. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2020 tersebut delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekjen Kemhan, Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, M.D.S. Forum kerja sama ditingkat ASEAN tersebut sejauh ini telah menghasilkan sebuah upaya konkrit berupa kolaborasi diantara negara ASEAN melalui ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) berupa pelaksanaan *Table-Top Exercise* (TTX) Covid-19.

Kegiatan latihan bersama penanganan Covid-19 tersebut dilaksanakan secara online pada tangga 27 Mei 2020. Pada kegiatan itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirkes Ditjenkuathan Kemhan, Laksma TNI dr. Arie Zakaria, Sp.OT dengan staf pendamping dari Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan, Puskes TNI, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Ditkerma Polkam ASEAN Kemenlu, dan BNPB.

Selain diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN, TTX Covid-19 tersebut juga dihadiri oleh observer dari Sekretariat ASEAN, AHA Center, dan *Plus Countries* (Australia, China, India, Jepang, New Zealand, Rusia dan USA) serta perwakilan WHO. Melalui kegiatan latihan tersebut para peserta dan pengamat yang hadir saling belajar dan bertukar pengalaman tentang penanganan Covid-19 guna meningkatkan kemampuan respon bersama terhadap wabah tersebut.

Kegiatan ADSOM *Leaders Virtual Conference* dan TTX Covid-19 merupakan langkah nyata Kemhan bersama dengan mitra di ASEAN dalam menindaklanjuti pertemuan para kepala negara ASEAN dalam KTT ASEAN tentang Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual pada 14 April 2020. Dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara ASEAN untuk bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi untuk melawan pandemi Covid-19.

Ada empat pandangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait penanganan Covid-19 yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virus di perbatasan negara ASEAN, pencegahan hambatan lalu lintas barang, kerja sama perlindungan warga ASEAN serta kolaborasi dengan mitra ASEAN, termasuk ASEAN Plus Three yaitu Jepang, Korea dan Tiongkok. Presiden Joko Widodo juga menyambut baik pembuatan ASEAN Covid-19 Response Fund untuk menghadapi situasi darurat seperti saat ini.

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Melalui forum *ADSOM Leaders Virtual Conference* tersebut Kemhan juga menjajagi kemungkinan kerjasama penyediaan perlengkapan medis seperti APD, Rapid Test PCR, Ventilator dan peralatan medis lain, sehingga diharapkan tidak ada negara anggota ASEAN yang kekurangan peralatan medis saat menghadapi pandemi serupa di masa yang akan datang. Selain itu Kemhan juga melihat potensi kerjasama lain seperti penelitian vaksin serta pertukaran informasi tentang pandemi Covid-19 yang merupakan bentuk ancaman bersama non tradisional lintas negara.

Upaya Penguatan dan Antisipasi Keamanan Regional dan Global Selama dan Pasca Covid-19

Meskipun fokus perhatian hampir seluruh instansi negara di dunia tercurah kepada upaya penanganan Covid-19, Kemhan menyadari bahwa aspek kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan selama dan pasca wabah Covid-19 tidak boleh diabaikan. Oleh karena selain memberikan perhatian khusus terhadap penanganan Covid-19 Kemhan juga tetap melaksanakan program dan kegiatan penguatan bidang pertahanan guna mengantisipasi kerawanan keamanan baik di kawasan regional maupun global.

Kemhan berupaya untuk tetap melanjutkan pelaksanaan kerja sama pertahanan dengan negara – negara sahabat ditengah wabah Covid-19 meskipun tidak mudah dikarenakan pemotongan anggaran dan pembatasan ruang gerak secara fisik akibat kebijakan PSBB di Indonesia serta penerapan travel restriction dan social distancing di negara mitra luar negeri. Untuk menyiasati situasi tersebut Kemhan bekerja dengan negara sahabat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu telepon dan video conference, untuk melaksanakan kegiatan kerja sama yang telah diagendakan.

Kegiatan TTX Covid-19 tersebut di atas merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kegiatan capacity building di bidang pertahanan tetap dapat dilakukan ditengah wabah Covid-19. Contoh lain adalah tetap berlangsungnya forum dialog antara pejabat Kemhan dengan para mitra di luar negeri, baik di tingkat Menteri maupun pejabat eselon pelaksana. Pada tingkat Menteri misalnya Menteri Pertahanan RI, Prabowo

Subianto, melakukan sejumlah pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Australia, Senator Linda Reynolds, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper serta mendapatkan kunjungan dari beberapa perwakilan negara sahabat. Pejabat eselon pelaksana seperti Sekjen Kemhan dan para Dirjen di lingkungan Kemhan juga tetap melaksanakan agenda dialog dengan counterpart dari negara sahabat melalui telepon atau *video conference*.

Dalam bidang kerja sama pendidikan, siswa asing yang telah terlanjur datang di Indonesia dan sedang mengikuti KIBINA (Kursus Intensif Bahasa Indonesia) sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan di Indonesia, dapat terus mengikuti KIBINA hingga selesai. Setelah selesai mengikuti KIBINA, peserta kembali ke negara asalnya dan mengikuti pendidikan secara online dari negaranya.

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Amerika Serikat dan Australia memulangkan seluruh siswanya dari Indonesia selama wabah Covid-19 berlangsung dan menunggu sampai situasi dan kondisi menjadi lebih baik. Namun sejumlah negara tetap mengirimkan siswanya untuk mengikuti proses belajar mengajar di Indonesia dan dapat mengikuti pelajaran in-campus selama Lembaga Pendidikan terkait mengijinkan.

Keputusan untuk menerima atau tidak menerima siswa asing *in campus* ditentukan oleh matra tiap angkatan. Selama wabah Covid-19 Seskoad tetap menerima siswa asing in campus. Namun Seskoal dan Seskoau tidak menerima kehadiran siswa asing *in-campus* selama pandemi Covid-19. Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara virtual dari negara masing-masing peserta.

Keberlanjutan kegiatan latihan bersama, seperti TTX Covid-19, forum dialog antar pejabat pertahanan dan pendidikan selama wabah Covid-19, meskipun dilaksanakan secara virtual, diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program *capacity building* bidang pertahanan serta menjadi *confidence building measures* diantara negara – negara sahabat dalam rangka penguatan kapasitas pertahanan dan antisipasi terhadap kerawanan keamanan yang mungkin timbul pasca Covid-19.

Penutup

Covid-19 telah mengganggu secara serius seluruh aspek kehidupan masyarakat secara luas dan kompleks. Menghadapi situasi tersebut Pemerintah RI telah melakukan langkah dan kebijakan yang *extra ordinary* demi menjamin keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Menindak lanjuti kebijakan Pemerintah RI tersebut, Kemhan juga telah melakukan langkah dan kebijakan yang nyata guna membantu Pemerintah dalam percepatan penanganan wabah Covid-19. Diantara langkah tersebut adalah melalui kerja sama internasional di bidang pertahanan, baik melalui forum bilateral maupun multilateral, seperti penerimaan bantuan alat kesehatan dari negara sahabat dan pemanfaat forum kerja sama multilateral. Kemhan juga menjalin kerja sama pertahanan dengan negara – negara sabahat dalam upaya penguatan kapasitas pertahanan dan antisipasi terhadap kerawanan keamanan regional dan global selama dan pasca Covid-19.

Langkah nyata Kemhan membantu Pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 terbukti telah memberikan kontribusi signifikan terhadap mitigasi penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Namun langkah dan kebijakan yang telah diambil saat ini harus terus ditingkatkan karena sampai saat ini belum ada tanda – tanda bahwa wabah akan segera berakhir. Untuk itu diperlukan kerja sama, kerja keras dan kemauan bertindak yang dijiwai semangat gotong royong dari seluruh elemen bangsa agar upaya percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia dapat berhasil.***

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SDM KESEHATAN KEMHAN/MABES TNI SERTA KAPASITAS SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KESEHATAN DALAM PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Oleh:
Marsekal Muda TNI N. Ponang Djawoto
Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan

Pendahuluan

Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya Kemhan menyelenggarakan fungsi antara lain yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

Tugas lainnya yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemhan. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan, pengelolaan instalasi strategis pertahanan serta dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kemhan.

Tugas-tugas tersebut apabila dikaitkan dengan terjadinya Pendemi Covid-19, sudah semestinya Kemhan dan TNI dapat berperan aktif sesuai tugasnya dalam menghadapi wabah tersebut.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2019, Menteri Pertahanan diinstruksikan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama dalam pengerahan sumber daya sektor pertahanan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non alam baik mengandung unsur kesengajaan maupun tidak.

Sedangkan Panglima Tentara Nasional Indonesia diintruksikan untuk mengerahkan personel, sarana, dan prasarana serta upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat sebelum, selama, dan sesudah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam serta memberikan komando penanggulangan taktis dalam kejadian

kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non alam, baik yang mengandung unsur kesengajaan maupun tidak.

Sesuai amanat Inpres tersebut, baik Kemhan maupun TNI harus senantiasa bersinergi dan mempersiapkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19.

Upaya dan strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 adalah dengan cara meningkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Selain itu upaya lainnya yaitu, peningkatan kapasitas Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dimiliki oleh Kemhan dan TNI, peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan agar mampu dan siap dalam memfasilitasi Pandemi Covid-19. Faktor penunjang yang lain misalnya ketersediaan obat-obatan, peralatan Rapid Test dan ataupun RT-PCR menjadi perhatian utama untuk segera difasilitasi.

Kondisi Saat Ini

Berbicara tentang kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) personel Kesehatan TNI yang dimiliki oleh Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Kementerian Pertahanan, pada kondisi saat ini terbilang cukup memadai. Sekitar 27.163 personel Kesehatan TNI yang berasal dari berbagai Keahlian dan Profesi saat ini tersebar di 110 Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan TNI. Berikut Data Rekapitulasi personel kesehatan TNI :

DATA REKAPITULASI PERSONEL KESEHATAN DI 110 RS KEMHAN DAN TNI

NO	KEAHLIAN/PROFESI	PERSONEL KESEHATAN TNI					JUMLAH	KET
		MABES TNI	TNI AD	TNI AL	TNI AU	KEMHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**MEDIS**							
1	Dokter Umum	24	644	334	153	33	1188	
2	Dokter Gigi	12	158	143	434	4	751	
3	Apoteker/ Farmasi	7	143	107	66	7	330	
B	**PARAMEDIS**						0	
1	Keperawatan	73	10694	3238	1918	327	16250	
2	Perawat Spesialis		7			2	9	
C	**MEDIS SPESIALIS**							
1	Akupuntur	0	3	0	1	0	4	
2	Anak	0	82	6	11	4	103	
3	Andrologi	0	1	0	0	0	1	
4	Anesthesi	1	90	14	14	5	124	
5	Bedah	0	119	20	17	2	158	
6	Bedah Anak	0	5	3	0	0	8	
7	Bedah Orthopedi	0	47	12	7	2	68	
8	Bedah Plastik	0	4	3	1	2	10	
9	Bedah Saraf	0	15	9	2	1	27	
10	Bedah Thorak	0	6	2	1	0	9	

11	Fisik dan Rehabilitasi Medik	0	8	5	5	4	22	
12	Gizi Klinik	0	8	0	0	0	8	
13	Kardiology	0	22	8	5	2	37	
14	Kesehatan Olah Raga	0	1	0	0	0	1	
15	Kedokteran Nuklir	0	12	0	0	0	12	
16	Kesehatan Jiwa	0	29	11	10	2	52	
17	Kulit dan Kelamin	0	37	5	3	1	46	
18	Mata	0	63	9	9	1	82	
19	Obgyne	0	108	8	9	4	129	
20	Paru	0	32	11	9	2	54	
21	Patology Anatomi	0	11	6	6	1	24	
22	Patology Klinik	0	39	6	0	1	46	
23	Penyakit Dalam	0	48	15	18	4	85	
24	Radiology	0	113	13	13	3	142	
25	Rehabilitasi Medik	0	2	0	0	0	2	
26	Saraf	0	46	7	11	3	67	
27	THT	0	63	17	9	1	90	
28	Urology	0	15	5	5	1	26	
29	Kedokteran Penerbangan	1	0	2	9	0	12	
30	Kedokteran Emergency	0	0	3	1	2	6	
31	Mikrobiologi Klinik	0	0	0	1	0	1	
32	Farmakology Klinik	0	0	0	1	0	1	
D	**DOKTER SPESIALIS GIGI**							
33	Penyakit Mulut	0	0	3	1	0	4	
34	Bedah Mulut	0	12	11	9	1	33	
35	Konservasi Gigi	0	18	25	13	1	57	
36	Ortho	2	6	16	7	1	32	
37	Periodonsi	0	5	17	3	1	26	
38	Prosthodonsi	0	6	24	5	0	35	
39	Pedodonsi	0	2	7	4	0	13	
E	**DOKTER SUBSPESIALIS**							
40	Onkology	0	6	6	2	0	14	
41	Digestif	0	3	3	1	0	7	
42	Panggul dan Lutut	0	0	0	0	0	0	
43	Kardio SNS	0	0	0	0	0	0	
44	KON Ginjal	0	3	0	0	0	3	
45	TKV	0	0	0	1	0	1	
46	Spine	0	0	0	0	0	0	
47	Tor Kardio	0	0	0	0	0	0	

48	Forensik	0	0	0	1	0	1	
49	Subspesialis Bedah	0	3	1	0	0	4	
50	Subspesialis Peny. Dalam	0	0	2	0	1	3	
51	Subspesialis Anak	0	0	1	0	0	1	
52	Subspesialis Obgyne	0	0	1	0	0	1	
53	Subspesialis Mata	0	0	1	0	0	1	
54	Subspesialis THT	0	0	1	0	0	1	
55	Subspesialis Saraf	0	0	1	0	0	1	
56	Subspesialis Jantung	0	0	0	0	0	0	
57	Subspesialis Kulit dan Kelamin	0	0	0	0	0	0	
58	Subspesialis Kesehatan Jiwa	0	0	0	0	0	0	
59	Subspesialis Paru	0	0	0	0	0	0	
60	Subspesialis Gigi dan Mulut	0	0	0	0	0	0	
61	Subspesialis Othopedi	0	0	3	0	2	5	
62	Subspesialis KIC	0	0	3	0	0	3	
63	Konsultan Intensif Care	0	0	0	0	0	0	
64	Anesthesi dan Reanimasi	0	0	0	2	0	2	
F	**TENAGA KESEHATAN LAINNYA**							
	Tenaga Kesehatan lainnya	73	5724	726	407	112	6930	
Jumlah		193	18463	4874	3205	540	27163	

Sumber : Ditkes Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan

Sementara itu terkait dengan kapasitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan yang dimiliki seluruh Rumah sakit Kemhan dan TNI, dalam rangka membantu percepatan penanganan Pandemi Covid saat ini sudah terakomodir.

Adapun gambaran Sarpras dan Prasarana fasilitas Kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Kemhan dan TNI adalah sebagai berikut :

Rumah Sakit dr. Suyoto memiliki Ruang Rawat 250, Ruangan ICU sebanyak 7 kamar, Ruangan HCU sejumlah 29 Ruangan Isolasi Tekanan Negatif 36. Sedangkan untuk Rawat Inap Isolasi khusus pasien yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 36 ruang yang meliputi, Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Ringan 27 Ruang, dan Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Berat 7 Ruang.

Rumah Sakit Pusat TNI AD (RSPAD) Gatot Soebroto memiliki ruang rawat 697, Ruang ICU sebanyak 50 kamar, Ruang HCU sejumlah 30, Ruang Isolasi Tekanan Negatif 4. Sedangkan untuk Rawat Inap Isolasi khusus pasien yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 73 ruang yang meliputi, Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Ringan 49 Ruang, dan Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Berat 24 Ruang.

Rumah Sakit Jajaran Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad) memiliki ruang rawat 7710, Ruang ICU sebanyak 148 kamar, Ruang HCU sejumlah 148, Ruang Isolasi Tekanan Negatif 4. Sedangkan untuk Rawat Inap Isolasi khusus pasien yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 1110 ruang yang meliputi, Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Ringan : 870 Ruang, dan Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Berat : 240 Ruang.

Rumah Sakit Jajaran Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Diskesal) memiliki ruang rawat 2094, Ruang ICU sebanyak 76 kamar, Ruang HCU sejumlah 4,

Ruang Isolasi Tekanan Negatif 32 (dalam Proses). Sedangkan untuk Rawat Inap Isolasi khusus pasien yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 250 ruang yang meliputi, Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Ringan : 173 ruang, dan Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Berat 77 ruang.

Rumah Sakit Jajaran Diskesau memiliki ruang rawat 1375, Ruang ICU sebanyak 19 kamar, Ruang HCU sebanyak 22, Ruang Isolasi Tekanan Negatif 2. Sedangkan untuk Rawat Inap Isolasi khusus pasien yang terinfeksi Covid-19 sebanyak 394 ruang yang meliputi, Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Ringan 306 ruang, dan Rawat Inap Isolasi dengan Gejala Berat : 88 ruang.

Kondisi Yang Diharapkan

Koondisi yang diharapkan pada pemenuhan Sarpras dan fasilitas Kesehatan di dalam proses percepatan penangan wabah Covid-19 ini, khususnya pada penyediaaan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan TNI, salah satunya dengan membentuk Komponen Cadangan Bidang Kesehatan yang dipersiapkan untuk diterjunkan dalam penananan Covid-19. Selain itu juga mencetak Sumber Daya Manusia unggul di bidang kesehatan, terutama ahli laboratorium, epidemiologi, farmakologi dan virologi.

Sedangkan pada Kapasitas Sarpras Fasilitas Kesehatan, kondisi yang diharapkan dari Rumah Sakit yang ada di Kemhan dan TNI adalah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dukungan kesehatan secara optimal dan selalu siap setiap saat. Terlebih lagi kesiapsiagaan dalam penanganan kemungkinan adanya kasus-kasus kesehatan tertentu, seperti dalam kesiapsiagaan penanganan wabah pandemi seperti Covid-19. Kondisi yang diharapkan tersebut dapat digambarkan jika setiap Rumah Sakit dilengkapi dengan sarpras fasilitas kesehatan seperti : Ruang Rawat, ODP, Ruang Isolasi Tekanan Negatif (TN) yang terdiri dari Jumlah tempat tidur isolasi tekanan negatif lengkap dengan Ventilator dan Jumlah tempat tidur isolasi tekanan negatif tanpa Ventilator, Tempat tidur Isolasi Biasa, Ruang HCU, Ruang ICU biasa, fasilitas Ventilator dan PCR.

Upaya dan Langkah Strategis yang dilaksanakan

Ditengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini, Pemerintah khususnya Kementerian Pertehanan tidak tinggal diam, dan telah melakukan segala upaya dalam proses percepatan penanganan Wabah Covid-19 yang sudah berlangsung cukup lama ini.

Adapun upaya yang tengah dilaksanakan yaitu,

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Kemhan merencanakan pemenuhan kebutuhan melalui pengadaan sarana prasarana serta alat dan materiil kesehatan dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Rumkit Kemhan dan TNI.

Perincian alat dan material kesehatan (Almatkes) tersebut yang akan untuk diadakan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 diantaranya, APD atau Alat Pelindung Diri (level III), Rapid Tes, yang terdiri dari Rapid Tes IgG/IgM dan Rapid Tes Swab tes/Antigen (termasuk alat), Mesin untuk Rapid Tes Swab, PCR System beserta perlengkapannya berikut Kontainer Laboratorium Level 2, Reagen dan consumable atau bahan habis pakai untuk PCR, Masker KN95, dan Ventilator.

Disamping itu Kemhan juga mengadakan Alkes ruang perawatan ODP (lengkap), Alkes ruang HCU (lengkap), Alkes ruang ICU (lengkap), APD dan matkes khusus Batalyon Kesehatan (Yonkes) TNI. Disamping itu juga upaya peningkatan kemampuan medis kapal bantu rumah sakit, berupa alkes KRI Soeharso dan sebagian kontainer medis KRI Semarang, Alkes pendukung lainnya keperluan RS, diantaranya: *Mobile X-Ray*, *Digital Flat Detector*, Apron, Alat Transportasi Pasien, *Infected Patient Transport Isolation Chamber*, *Thermogun Infra red*, USG 4D, Peningkatan Alkes RS dr Suyoto, Rumah Sakit Lapangan beserta perlengkapannya, serta penyediaan Vitamin dan obat-obatan.

Selain itu dalam hal penyediaan bantuan tenaga Kesehatan, Kemhan akan memberdayakan komponen cadangan bidang kesehatan yang telah dibentuk dan dipersiapkan untuk diterjunkan pada percepatan penanganan Covid-19.

Sementara itu langkah-langkah strategis Kemhan dan TNI yang dilaksanakan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mendorong pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lain dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-2019 (Covid-19).

b. Meningkatkan Kemampuan Kapasitas Sarana Prasarana (Sarpras) Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI meliputi:

1) Sarpras kesehatan Faskes TNI agar memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk penanganan Covid-19 dengan melengkapi ruangan perawatan Covid -19 bertekanan negatif dan ventilator.

2) Kapal Rumah Sakit milik TNI AL (KRI dr. Suharso dan KRI Semarang) agar dilengkapi dengan faskes yang siap untuk penanganan Covid -19.

3) Lembaga Farmasi, Biologi dan Vaksin (Lafibiovak) yang siap untuk penanganan Covid-19.

4) Batalyon Kesehatan (Yonkes) yang dimiliki oleh TNI (Yonkes1&2 Kostrad, Yonkes 1&2 Kormar, serta Yonkes Denma Mabes TNI AU) agar mampu dan memiliki fasilitas untuk penanganan Covid-19.

c. Meningkatan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan TNI, seperti:

1) Membentuk Komponen Cadangan Bidang Kesehatan yang dipersiapkan untuk diterjunkan dalam penanganan Covid-19.

2) Mencetak Sumber Daya Manusia unggul di bidang kesehatan, terutama ahli, laboratorium, epidemiologi, farmakologi, virology, NUBIKA aspek Kesehatan, Biodefence dan ahli dalam bidang Biosecurity dan Biosafety.

d. Melakukan transformasi di bidang Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Pertahanan (Unhan) dengan mendirikan Fakultas Kedokteran Militer, Fakuktas Farmasi Militer, dan Fakultas Teknik Militer.

e. Mendorong penggunaan berbagai indikator kesehatan masyarakat yang berbasis data sebagai landasan ilmiah untuk menerapkan "masyarakat produktif dana aman Covid-19" yaitu berdasarkan kriteria epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

f. Penekanan di dalam pelaksanaan kebijakan Protokol Kesehatan dengan menerbitkan Surat Edaran sesuai kewenangan tingkat Kementerian dan selalu berpedoman kepada regulasi dari Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

g. Melaksanakan pemanfaatan kerja sama dengan pihak *World Health Organisation (WHO), ASEAN Coordinating for Hummanitarian on Disaster Management Assistance (AHA Center)*, serta meningkatkan kerja sama antar negara ASEAN dan *Plus Countries* (Amerika Serikat, Rusia, Jepang, India, RRT, Australia, New Zealand, dan Korea Selatan) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 melalui T*able Top Exercise (TTX), Workshop, Subject Matter Expert Exchange (SMEE)*, saling tukar menukar pengalaman untuk memperkuat *Platform* di masa depan, dan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan negara sahabat untuk menfasilitasi bantuan kemanusiaan berupa alat kesehatan.

Kesimpulan

Petugas medis seperti dokter, perawat maupun petugas medis lainnya yang sering kontak dengan pasien Covid-19 merupakan kelompok yang paling berisiko terkena penyakit kasus Covid-19, sehingga Rumah Sakit (Rumkit) Kemhan dan TNI perlu selalu memiliki ketersediaan APD (tidak boleh buffer stock, kosong) sesuai standard agar mereka terlindungi infeksi Covid-19.

Demi efektifitas pelayanan Covid-19 pada tiap Rumkit Kemhan dan TNI, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat kesehatan ventilator, sarana prasarana pada ruang ICU, ruang HCU, ruang ODP, ruang isolasi yang bertekanan negatif, dan alat kesehatan pendukung lainnya seperti *mobile x-ray, digital flat detector*, apron, alat transportasi pasien, *infected pasient transportation isolation chamber, thermogun infrared*, dan USG 4D.

Sementara itu untuk menghindari keterlambatan diagnosis kasus Covid-19 yang menyebabkan pasien tidak mendapatkan perawatan sesuai standard Covid-19 dan mengakibatkan pasien meninggal dunia saat dalam perawatan sebelum terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19, maka tiap Rumkit Kemhan dan TNI perlu dilengkapi peralatan Swab (PCR) sehingga tidak butuh waktu berhari-hari mendapatkan hasil Swab dari laboratorium di tempat lain.

Untuk mendeteksi antibodi yang dibentuk oleh tubuh secara cepat, sebagai upaya pemeriksaan screening atau penyaringan (bukan untuk mendiagnosa infeksi Covid-19) kepada personel Kemhan dan TNI beserta keluarganya bila diduga terjangkit kasus penyakit Covid-19, sehingga perlu ketersediaan perangkat Rapid Test berikut reagent pada tiap Faskes Kemhan dan TNI.

Keterbatasan sarana Kesehatan yang dimiliki Kemhan dan TNI dalam membantu penanggulangan Covid-19 dan pandemi global lainnya yang mungkin terjadi di masa depan sehingga perlu dukungan perangkat Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) bagi tiap Batalyon Kesehatan TNI.

Sebagai Kapal bantu Rumkit agar dapat memberikan pelayanan dan dukungan kesehatan secara maksimal pada kegiatan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Sebelum Perang (OMSP) serta berperan aktif dalam penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19 maupun pandemi global lainnya di masa depan sehingga KRI Soeharso dan KRI Semarang perlu dilengkapi modernisasi pemenuhan alat kesehatan maupun renovasi dan perbaikan kontainer medis yang sudah ada. Guna membantu percepatan penanganan kasus Covid-19 pada tiap Rumkit Kemhan dan TNI perlu difasilitasi vitamin dan obat-obatan tambahan seperti Vitamin C dosis tinggi, *Hydroqloroquine, Azythromicyn, dan Zinkssulfate.****

Menhan Sebagai *Leading Sector* Dalam Pengembangan *Food Estate* Bekerjasama Dengan Men PUPR dan Mentan

Oleh:
Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M
Kepala Biro Humas Setjen Kemhan

"Bersama dengan Kementerian lainnya Kementerian Pertahanan akan terus bersinergi dalam upaya untuk mewujudkan program cadangan ketahanan pangan." Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam unggahan akun Instagram pribadinya setelah ditunjuk Presiden RI sebagai leading sector dalam pengembangan "*Food Estate*" atau lumbung pangan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Juli 2020.

Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai *leading sector* dalam pengembangan lumbung pangan Nasional atau "*Food Estate*" karena hal ini menyangkut cadangan strategis pangan. Hal ini dijelaskan dalam Siaran Pers Resmi Istana, Kamis 9 Juli 2020. Sebagai *leading sector*, Menhan bekerjasama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta dukungan dari para Kepala Daerah.

Ditegaskan oleh Presiden RI bahwa cadangan logistik itu juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengenai ancaman krisis pangan. Pengembangan "*Food Estate*" di Kalimantan Tengah, dimana Kementerian Pertahanan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai *leading sector* dilandasi oleh perspektif pertahanan negara, seperti yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Undang-undang tersebut didalam pasal 6 dinyatakan "bahwa Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman".

Di dalam UU Pertahanan Negara dipahami bahwa ancaman itu terdiri dari ancaman militer, Nirmiliter dan Hibrida, merujuk apa yang telah disampaikan oleh Presiden mengutip peringatan organisasi pangan

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

dan pertanian dunia PBB (FAO) bahwa ada potensi ancaman krisis pangan dunia di waktu-waktu yang akan datang seiring merebaknya pandemi Covid 19, atau pun krisis-krisis yang disebabkan karena faktor-faktor lainnya. Oleh sebab itu, perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak mengalami krisis pangan.

"Food Estate" di Kalimantan Tengah ini dikembangkan sebagai pusat pertanian pangan sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara. *"Food Estate"* bukan program cetak sawah, namun pengembangan pusat pangan selain tanam padi juga akan dikembangkan pusat-pusat pertanian pangan lainnya, seperti singkong, Jagung, dan lain-lain, sesuai dengan kondisi lahan disana.

"Food Estate" sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara berfungsi membantu Kementerian Pertanian dan Bulog, bila suatu saat dalam kondisi tertentu terjadi kekurangan supply pangan. Cadangan pangan yang sudah dikembangan dan dipersiapkan di *food estate* Kalimantan Tengah tersebut siap digunakan. "*Food Estate"* dikembangkan sebagai; Pertama sebagai pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara. Kedua sebagai Cadangan melalui pengelolaan penyimpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, dan ketiga melakukan distribusi cadangan pangan keseluruh Indonesia.

"Food Estate" project sendiri telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. *"Food Estate"* merupakan sebuah program jangka panjang dalam penyediaan lahan baru, serta rehabilitasi lahan yang ada dengan meningkatkan sarana untuk mendukung produktivitas lahan, terutama dari sisi pengairan dan *drainase* di lahan berawa. Kawasan pangan ini rencananya akan dikembangkan di atas lahan seluas 600.000 hektar.

Ada dua lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi. Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar. Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah tengah dikembangkan menjadi lumbung pangan baru di luar Jawa. Luas lahan potensialnya 20.704 hektar, yang 5.840 hektar di antaranya telah berproduksi. Di seluruh Kalteng, ada sekitar 165.000 hektar lahan potensial bagi pengembangan kawasan *"Food Estate"*.

Di Kab. Pulang Pisau, Pemerintah melakukan pembangunan peningkatan jaringan reklamasi rawa di Tahai Baru, dan merehabilitasi jaringan irigasi di Desa Pangkoh Hulu. Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare lahan potensial. Presiden Jokowi

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

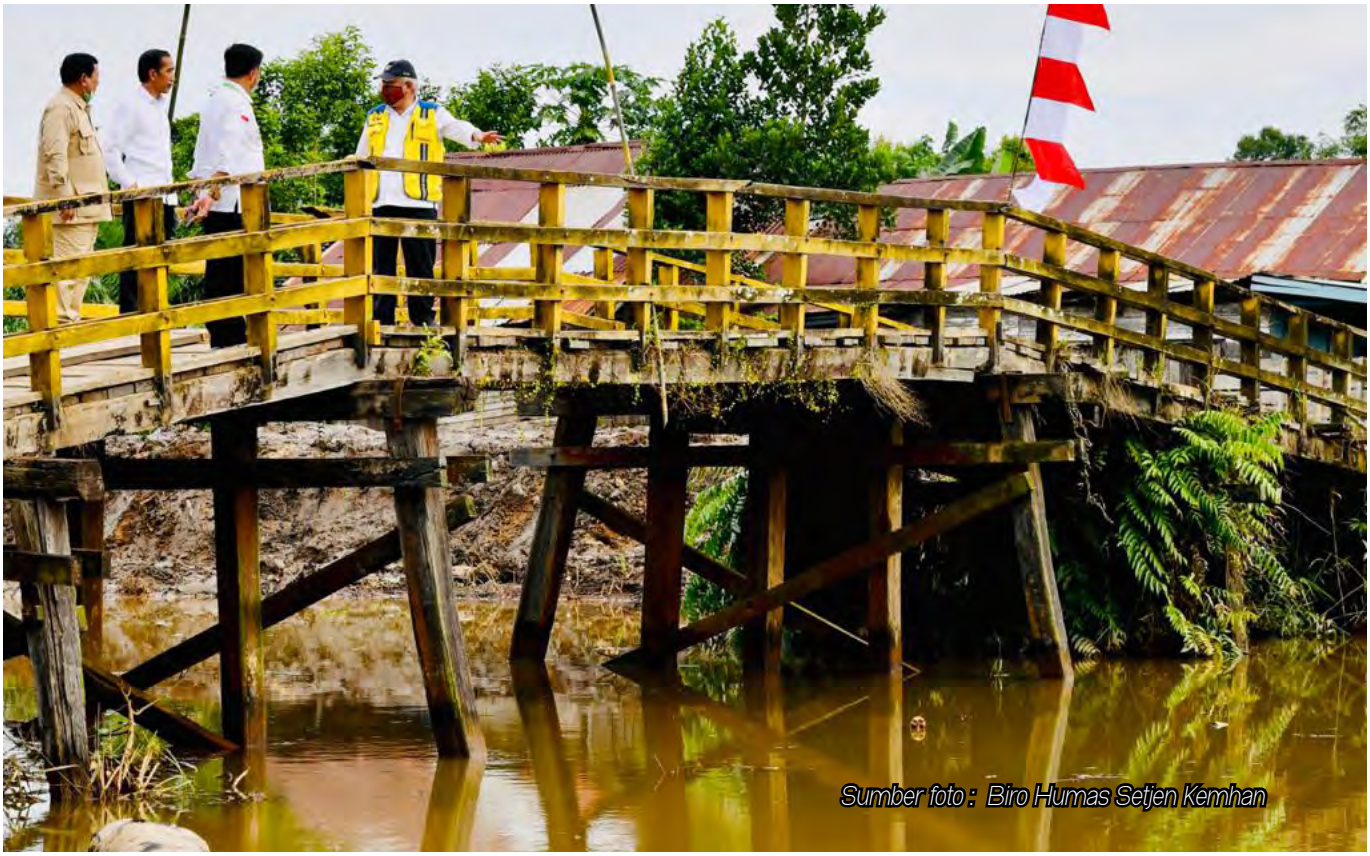
Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

mengatakan, untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan. "Dalam 1,5 sampai maksimal dua tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas".

Presiden berharap pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa ini dapat menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Untuk mempertahankan daya beli masyarakat terdampak pandemi, pemerintah mendorong kebijakan Padat Karya Tunai di daerah. Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp11,3 triliun di sekitar 23.392 lokasi pengerjaan yang dapat memberdayakan sekitar 612.956 pekerja setempat.

Presiden Jokowi telah mematok target proyek yang mulai digarap pada tahun ini sekitar 30.000 hektar terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas.

Selain itu, Pengembangan *"Food Estate"* yang sedang digarap oleh pemerintah ini merupakan *"Food Estate"* modern sehingga tidak hanya manual tetapi juga harus dengan skilled labour. Dengan tenaga kerja yang terlatih karena bukan hanya menyangkut produksi tetapi juga sampai ke pasca produksi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan optimalisasi lahan rawa dinilai menjadi salah satu terobosan yang tengah fokus dilakukan untuk meningkatkan atau mengamankan ketersediaan beras dalam negeri sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri. Pengembangan lahan rawa menjadi lumbung pangan berada di kawasan aluvial pada lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek ini telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Proyek *"Food Estate"* kawasan aluvial pada lahan eks lahan gambut ini memiliki lahan potensial seluas 165 ribu hektar. Pengembangan lahan *"Food Estate"* di Kalteng terdiri dari lahan intensifikasi seluas 85.456 hektar dan lahan ekstensifikasi seluas 79.142 hektar. Dimulai Pada tahun 2020 dengan pengembangan lahan intensifikasi seluas 30 ribu hektar sebagai model percontohan food estate modern berbasis korporasi petani.

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun telah ditugaskan untuk memperbaiki jaringan irigasi guna mendukung penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare yang

merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG). Menurut Menteri PUPR, kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Karena itulah Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya. Dari 165.000 hektar lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektar merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektar sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan saja. Untuk peningkatan irigasi, diperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,9 Triliun untuk Tahun 2021 dan 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, lahan food estate akan dikembangkan secara modern. Kementerian PUPR beserta Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat untuk memprioritaskan lahan seluas 28.000 hektar dan disiapkan untuk musim tanam Oktober-Maret. Untuk itu, Kementerian PUPR mendukung manajemen water melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran dan jaringan irigasi, baik mulai irigasi primer, sekunder, tersier maupun kuarternya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi jaringan irigasi di lahan *food estate* akan segera dilakukan, agar tahun ini pengembangan bisa dimulai. Setelah rehabilitasi irigasi selesai dikerjakan, pengerjaan selanjutnya akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, mulai dari penyiapan bibit hingga alat mesin pertanian.

Menurut Menteri PUPR, rehabilitasi tersebut juga disiapkan untuk musim tanam Oktober-Maret. Rehabilitasi jaringan irigasi ditargetkan rampung pada tahun 2022 dengan biaya sekitar Rp 2,9 Triliun. Sedangkan biaya untuk merancang rehabilitasi irigasi pada tahun 2020 sekitar Rp 49 Miliar. Dengan adanya rehabilitasi ini, maka produktivitas lahan *"Food Estate"* dapat ditingkatkan menjadi 4-5 ton per hektar. Hingga saat ini, produktivitas dari sawah yang sudah ada baru sekitar 1,2-2,9 ton. Kementerian Pertanian dapat segera mengolah apabila sarana dan petani sudah tersedia. Pengembangan *"Food Estate"* ini rencananya tidak akan dilakukan secara tradisional, melainkan akan ada intervensi mekanisasi dan teknologi. Syahrul menambahkan, nantinya di lahan *food estate* akan ada *dryer* hingga *rice milling unit*.

Dengan demikian, beras yang dihasilkan sudah bisa dikemas dengan baik. Kementan sendiri akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 180 Milyar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan alat mesin pertanian dan sarana produksi. Pengerjaan lahan *food estate* ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2,1 Triliun.***

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan

Sumber foto : Biro Humas Setjen Kemhan